



Analisis Pemanfaatan Data Dalam Kondisi Sosial Ekonomi di Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi

Syiffa Aulia¹, Salix Fini Maris²

Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Putra¹, Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Putra²

Email: syiffa.aulia_mn22@nusaputra.ac.id, salix.finimaris@nusaputra.ac.id

Article Info

Submitted: December 2025

Revised: December 2025

Accepted: December 2025

Published: December 2025

Keywords: BPS; Diseminasi Pengolahan Data; Statistik Sosial Ekonomi; Sukabumi; Validasi Data

Abstrak

Kegiatan internship di instansi pemerintah menjadi sarana pembelajaran praktis bagi mahasiswa dalam memahami implementasi tata kelola data statistik secara nyata. Jurnal pengabdian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan internship di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukabumi pada periode 3 Februari 2025 hingga 30 Juni 2025, khususnya dalam konteks pemanfaatan data sosial ekonomi sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan observasi partisipatif, wawancara informal, dan studi pustaka. Selama kegiatan internship, mahasiswa terlibat langsung dalam pengolahan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), entri data menggunakan aplikasi CSPro, validasi data, serta mempelajari mekanisme pengelolaan keuangan negara melalui aplikasi SAKTI. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa data sosial ekonomi yang dihasilkan BPS—meliputi data kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, konsumsi rumah tangga, dan infrastruktur—memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah, monitoring program pembangunan, penyusunan indikator pembangunan seperti IPM dan Gini Ratio, serta pengambilan keputusan bisnis. Meskipun demikian, masih ditemukan tantangan berupa memastikan konsistensi dan akurasi data dari lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan modernisasi teknologi pengumpulan data agar kualitas tata kelola statistik dapat terus ditingkatkan sebagai fondasi pembangunan nasional berbasis bukti.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa perubahan fundamental dalam cara pemerintah mengelola dan memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy). Dalam konteks pembangunan nasional di Indonesia, data statistik memegang peran sentral sebagai landasan ilmiah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan akuntabel. Ketersediaan data yang akurat dan berkualitas menjadi prasyarat utama agar kebijakan pemerintah dapat dirumuskan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Mardiasmo, 2018).

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Badan Pusat Statistik, 1997). BPS mengemban tugas strategis dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data statistik yang menjadi rujukan utama bagi pemerintah dan masyarakat luas dalam berbagai aspek pembangunan nasional. Data dari BPS digunakan untuk perencanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi program pemerintah, penelitian ilmiah, pengambilan keputusan bisnis, serta penyusunan indikator pembangunan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Gini Ratio. Keterbukaan informasi statistik yang dikelola BPS juga sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang menekankan transparansi dan akuntabilitas (Dwiyanto, 2011).

BPS Kabupaten Sukabumi sebagai unit kerja vertikal dari BPS Provinsi Jawa Barat bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistik di wilayah Kabupaten Sukabumi. Kantor ini menjadi pusat



informasi data statistik resmi yang digunakan untuk perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, serta evaluasi program-program pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPS Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan berbagai survei periodik, di antaranya Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), yang menghasilkan data sosial ekonomi sebagai dasar perumusan kebijakan daerah.

Meskipun peran BPS sangat strategis, masih terdapat tantangan dalam proses pengolahan data di lapangan, khususnya terkait konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan oleh enumerator. Selain itu, pemahaman mahasiswa mengenai operasional lembaga statistik pemerintah masih terbatas karena minimnya pengalaman praktis di lingkungan kerja nyata. Program internship di instansi pemerintah seperti BPS menjadi salah satu solusi efektif untuk menjembatani kesenjangan antara pembelajaran teori di perguruan tinggi dengan praktik kerja nyata di lapangan. Melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan operasional BPS, mahasiswa dapat memperoleh kompetensi teknis sekaligus berkontribusi dalam mendukung kelancaran pelayanan publik di bidang statistik (United Nations Statistics Division, 2020).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian melalui program internship di BPS Kabupaten Sukabumi pada periode 3 Februari 2025 hingga 30 Juni 2025 sebagai bagian dari program Study Completion Program (SCP) jalur Internship Universitas Nusa Putra difokuskan pada pemahaman dan keterlibatan langsung dalam proses pengolahan data sosial ekonomi. Kegiatan ini bertujuan mendeskripsikan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistik sosial ekonomi di BPS Kabupaten Sukabumi, serta menganalisis bagaimana data tersebut dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan daerah. Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh wawasan nyata mengenai tata kelola data statistik sekaligus memberikan kontribusi positif bagi operasional BPS Kabupaten Sukabumi dalam melayani kebutuhan data Masyarakat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam proses pemanfaatan data sosial ekonomi di BPS Kabupaten Sukabumi. Data dikumpulkan melalui tiga metode utama:

- a. Observasi Langsung: Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap proses kerja di lingkungan kantor BPS, khususnya dalam kegiatan pengolahan data survei sosial ekonomi, mencakup pemeriksaan kuesioner, entri data ke sistem digital, serta validasi dan koreksi data.
- b. Wawancara: Wawancara informal dilakukan bersama pegawai dan staf yang menangani pengolahan data dari bidang statistik sosial, neraca, maupun bidang integrasi pengolahan dan diseminasi statistik, untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dan pemahaman tentang pemanfaatan data oleh stakeholder.
- c. Studi Pustaka dan Dokumentasi: Penulis mengkaji pedoman pengolahan Susenas dan survei lainnya, template hasil entri dan validasi data, serta statistik makro yang tersedia melalui website BPS Kabupaten Sukabumi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengidentifikasi pola, proses, dan hubungan antar variabel berdasarkan data yang dikumpulkan selama kegiatan internship berlangsung.



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil dan Struktur Organisasi BPS Kabupaten Sukabumi

BPS Kabupaten Sukabumi berlokasi di Jl. Raya Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebagai instansi vertikal BPS Provinsi Jawa Barat, BPS Kabupaten Sukabumi memiliki visi Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju dengan misi utama menyediakan statistik berkualitas berstandar nasional dan internasional, membina sistem statistik nasional yang berkesinambungan, mewujudkan pelayanan prima, dan membangun SDM yang unggul dan adaptif.

Struktur organisasi BPS mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala BPS Nomor 116 Tahun 2014, terdiri dari Kepala, Sekretariat Utama, berbagai Deputi Bidang (Metodologi dan Informasi Statistik; Statistik Sosial; Statistik Produksi; Statistik Distribusi dan Jasa; serta Neraca dan Analisis Statistik), Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dan Instansi Vertikal. Susunan organisasi ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas statistik secara komprehensif dari pusat hingga daerah (Sekretariat Negara, 2007).

3.2 Jenis Data Sosial Ekonomi yang Dikumpulkan BPS

Selama kegiatan internship, penulis terlibat langsung dalam pengolahan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Data sosial ekonomi penting yang dikumpulkan BPS Kabupaten Sukabumi mencakup beberapa dimensi utama:

- a. Data Kemiskinan: meliputi jumlah dan persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, dan kedalaman kemiskinan.
- b. Data Pendidikan: seperti angka partisipasi sekolah, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan rata-rata lama sekolah.
- c. Data Kesehatan: mencakup akses pelayanan kesehatan, status gizi, dan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- d. Data Ketenagakerjaan: termasuk status pekerjaan, jenis pekerjaan, serta tingkat pengangguran terbuka (TPT).
- e. Data Konsumsi dan Pengeluaran Rumah Tangga: untuk menghitung kesejahteraan masyarakat dan inflasi.
- f. Data Perumahan dan Akses Infrastruktur: seperti akses air bersih, sanitasi, listrik, dan kepemilikan rumah.

Data-data tersebut dikumpulkan secara periodik menggunakan instrumen survei yang telah distandarisi secara nasional, memungkinkan perbandingan antar waktu maupun antar wilayah.

3.2 Proses Pengolahan Data Statistik Sosial Ekonomi

Berdasarkan observasi dan keterlibatan langsung selama internship, proses pengolahan data di BPS Kabupaten Sukabumi mencakup delapan tahapan sistematis yang saling berkaitan:



Tabel 1. Tahapan Pengolahan Data Statistik Sosial Ekonomi di BPS Kabupaten Sukabumi

Penerimaan Dokumen	Kuesioner hasil wawancara dikumpulkan dari petugas lapangan (enumerator) dan dilakukan pemeriksaan awal untuk memastikan jumlah dokumen sesuai daftar sampel.
Editing Lapangan	Kuesioner diperiksa secara manual untuk memastikan tidak ada isian kosong, konsistensi antar jawaban, dan kebenaran penulisan kode.
Entri Data	Data dimasukkan ke sistem menggunakan aplikasi CSPro atau aplikasi internal BPS sesuai dengan kode dan kategori yang berlaku.
Validasi Otomatis	Sistem secara otomatis memunculkan peringatan jika ada isian tidak konsisten atau outlier yang perlu diperbaiki.
Validasi Manual	Operator validasi melakukan pengecekan silang antara data entri dengan kuesioner fisik untuk mengonfirmasi keakuratan input.
Daftar Error & Perbaikan	Seluruh kesalahan dicatat, dikonfirmasi ke petugas lapangan bila perlu, lalu data dikunci (locking) setelah perbaikan selesai.
Agregasi & Pengiriman	Data bersih dikompilasi dan diunggah ke BPS Provinsi atau BPS RI dalam bentuk file digital terenkripsi.
Dokumentasi & Backup	Seluruh dokumen fisik dan digital dicatat, disimpan, dan dibuatkan cadangan untuk audit atau referensi di masa mendatang.

3.3 Pemanfaatan Data Sosial Ekonomi

Data sosial ekonomi hasil survei BPS memiliki beragam pemanfaatan strategis yang berdampak langsung pada kualitas kebijakan dan pembangunan daerah:

- a. **Perumusan Kebijakan Pemerintah:** Pemerintah daerah menggunakan data BPS sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penentuan program bantuan sosial, dan pengembangan wilayah. Sebagai contoh, data kemiskinan digunakan untuk menentukan jumlah penerima bantuan sosial di Kabupaten Sukabumi.
- b. **Monitoring dan Evaluasi Program:** Data digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program pemerintah, seperti penurunan angka pengangguran, perluasan akses pendidikan, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- c. **Penyusunan Indikator Pembangunan:** Data BPS mendasari penghitungan indikator penting seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Gini Ratio, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
- d. **Penelitian Akademik dan Kajian:** Mahasiswa dan peneliti memanfaatkan data mikro dari Susenas untuk kebutuhan skripsi, tesis, atau penelitian sosial ekonomi lainnya.
- e. **Informasi Publik dan Transparansi:** Data statistik disajikan dalam bentuk publikasi resmi dan dapat diakses publik melalui website BPS Kabupaten Sukabumi (sukabumikab.bps.go.id), meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
- f. **Pertimbangan Dunia Usaha:** Pengusaha melihat data konsumsi dan struktur pendapatan rumah tangga untuk menentukan strategi pemasaran dan lokasi investasi.



3.4 Pengelolaan Keuangan: Surat Perintah Membayar (SPM)

Selain kegiatan statistik, selama internship penulis juga mempelajari aspek pengelolaan keuangan BPS. Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen formal yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) sebagai instruksi resmi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk pencairan dana APBN.

Di BPS Kabupaten Sukabumi, pengelolaan SPM telah sepenuhnya terintegrasi menggunakan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), yang memungkinkan proses penerbitan hingga pengiriman SPM ke KPPN dilakukan secara elektronik dengan dukungan tanda tangan digital. SPM digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan strategis, termasuk pembayaran gaji pegawai, belanja barang operasional, dan honorarium bagi Mitra Statistik yang terlibat dalam kegiatan survei dan sensus di lapangan.

3.5 Pengalaman dan Kompetensi yang Diperoleh

Melalui kegiatan internship selama lima bulan di BPS Kabupaten Sukabumi, penulis memperoleh berbagai kompetensi teknis dan non-teknis yang relevan dengan bidang manajemen:

- a. Pemahaman mendalam mengenai proses teknis pengolahan data survei sosial ekonomi dari hulu ke hilir.
- b. Pengalaman langsung dalam entri dan validasi data statistik menggunakan perangkat lunak CSPro.
- c. Wawasan tentang pentingnya data statistik sebagai dasar pengambilan keputusan publik dan perencanaan pembangunan.
- d. Keterampilan bekerja secara kolaboratif di lingkungan instansi pemerintah yang terstruktur.
- e. Pemahaman tentang sistem pengelolaan keuangan negara melalui aplikasi SAKTI dan mekanisme SPM.
- f. Kemampuan adaptasi dan profesionalisme dalam lingkungan kerja formal.

4. SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan internship dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa BPS Kabupaten Sukabumi memainkan peran yang sangat krusial sebagai penyedia data statistik sosial ekonomi yang berkualitas di tingkat daerah. Proses pengolahan data yang sistematis dan bertahap-mulai dari penerimaan dokumen, editing, entri data, validasi, hingga diseminasi-memastikan bahwa data yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi dan reliabilitas yang tinggi.

Data sosial ekonomi yang dihasilkan BPS terbukti memiliki nilai strategis yang tinggi bagi berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan, peneliti akademik, pelaku bisnis, maupun masyarakat umum. Indikator-indikator penting seperti IPM, Gini Ratio, angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran yang dihasilkan dari proses ini menjadi barometer utama keberhasilan pembangunan daerah.

Pengalaman internship di BPS Kabupaten Sukabumi memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya tata kelola data statistik yang baik sebagai fondasi pembangunan berbasis bukti. Ke depan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi teknologi pengumpulan data, dan penguatan sistem diseminasi informasi statistik menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas dan manfaat data statistik sosial ekonomi bagi masyarakat Indonesia.



5. PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Nusa Putra atas program Study Completion Program (SCP) yang memberikan kesempatan pelaksanaan internship serta dukungan fasilitas akademik. Penulis juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepala BPS Kabupaten Sukabumi beserta seluruh pimpinan, pegawai, dan staf di bidang statistik sosial, neraca, integrasi pengolahan, serta diseminasi statistik atas bimbingan, kepercayaan, dan kesempatan belajar yang diberikan selama kegiatan berlangsung. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh mitra statistik dan enumerator di lapangan yang telah membantu kelancaran proses pengumpulan data. Secara khusus, penulis berterima kasih kepada Bapak/Ibu Salix Fini Maris, M.M. selaku dosen pembimbing utama atas arahan, motivasi, serta bimbingan akademis dalam penyusunan laporan dan artikel jurnal ini. Semoga kerja sama dan ilmu yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi pengembangan tata kelola data statistik yang lebih baik di masa mendatang.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (1997). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik*. Badan Pusat Statistik.
- Dwiyanto, A. (2011). *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terbaru). Andi Offset.
- Sekretariat Negara. (2007). *Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik*.
- United Nations Statistics Division. (2020). *Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses*. United Nations.